

DPR AKAN TETAP UPAYAKAN SELESAIKAN UU TIPIKOR

Panitia Khusus (Pansus) DPR yang membahas RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan tetap berupaya menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sebelum masa jabatan berakhir 30 September 2009. Karena itu Pansus berharap dukungan dan kerja sama dengan pemerintah bisa lebih dioptimalkan.

Insyallah tidak hanya semangat, tapi Pansus berupaya menyelesaikan RUU Tipikor. Meski demikian penyelesaian RUU tidak hanya tergantung DPR tetapi juga perlu dukungan dan kerja sama dengan pemerintah," ujar Ketua Pansus RUU Tipikor Dewi Asmara kepada pers usai memimpin raker dengan Menhukham Andi Mattalata, Jaksa Agung Hendarman Supanji dan Meneg PAN Taufik Effendi di Gedung DPR Rabu (10/6).

Lebih lanjut Dewi Asmara

menyatakan, yang perlu dipikirkan dalam pembahasan RUU ini bukan hanya soal perumusannya tetapi juga sinkronisasi dengan Undang-undang lainnya. Dan yang lebih penting, lanjut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, setelah disahkan menjadi undang-undang dapat diaplikasikan di lapangan.

Sebelumnya dalam raker yang dipimpin Ketua Pansus Dewi Asmara didampingi Wakil Ketua Arbab Prapoeka menyetujui dan mengesahkan jadwal acara

pembahasan RUU Tipikor serta penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi kepada Pemerintah.

Dalam acara yang disepakati tercantum bahwa setelah raker pada hari ini DIM diserahkan, maka akan dilanjutkan pembahasan DIM pada Rabu (17/6) dalam raker Pansus dengan Wakil-wakil pemerintah. Pembahasan DIM dalam forum rapat kerja akan dilakukan sampai dengan Senin tanggal 29 Juni 2009.

Selesai pembahasan di tingkat Pansus, selanjutnya rapat Pansus akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang mengagendakan rapat mulai 30 Juni dan 1 Juli 2009. Selesai reses yang dimulai 4 Juli s/d 13 Agustus 2009, Panja akan kembali melanjutkan pembahasannya dan pada masa terakhir yang berlangsung 14 Agustus hingga 30 September, sehingga DPR periode 2004-2009 diharapkan akan mampu menuntaskan RUU yang sangat ditunggu masyarakat tersebut. (mp)

PANSUS RUU KEK SETUJU 73 DIM DIBAHAS DALAM TIMUS/TIMSIN

Pansus RUU KEK menyetujui sebanyak 73 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diserahkan dan dibahas dalam Tim Perumus (Timus)/Tim Sinkronisasi (Timsin) dari total 331 DIM. Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis (F-PDIP) didampingi dua Wakil Ketua Sundari Fitriyana (F-PPP) dan Nasril Bahar (F-PAN) dalam Rapat Kerja Pansus RUU KEK dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, di Gedung Nusantara I DPR, Selasa malam (9/6).

Irmadi Lubis menambahkan, untuk menyamakan persepsi terhadap usulan DIM fraksi-fraksi, Pansus RUU KEK setuju mengadakan konsolidasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Juni 2009. "Sedangkan untuk rapat kerja Pansus disetujui dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2009," tambahnya.

Anggota Pansus Zulkifli Halim (F-PAN) berpendapat, jangan ada timbul kesan bahwa cepatnya RUU ini karena kesepahaman fraksi saja. Pemerintah juga tolong mempelajari DIM ini, kata Zulkifli Halim. "Kalau ada bagian-bagian yang segera bisa diakomodir pemerintah jangan ngeyel," jelasnya.

Sementara itu Menteri Perdagangan

Mari Elka Pangestu mengatakan, setuju dengan diadakannya konsolidasi untuk menyamakan persepsi terhadap usulan DIM fraksi-fraksi. Pengertiannya adalah setelah Rapat Intern Panja tanggal 15 s/d 17 Juni 2009 diadakan rapat kerja terlebih dahulu.

"Kalau rapat kerjanya tanggal 22 Juni 2009 dan Panjanya yang dijadualkan semula tiga kali menjadi dua kali, apa perlu ditambah satu lagi," pinta Mari.

Dia menambahkan, sebelum masuk penutupan masa sidang Pansus KEK sudah bisa jalan dan sesuai dengan jadual yang direncanakan (Iwan)

Pansus kunjungi Kendal

Dalam kesempatan terpisah Ketua Tim Pansus KEK Sundari Fitriyana (F-PPP) mengatakan, RUU tentang KEK merupakan RUU yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan investor sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"DPR sudah menyiapkan waktu dan tenaga serta pikiran, maka dalam persiapan-persiapannya Tim Pansus RUU KEK meninjau langsung ke Kawasan Pengembangan Industri di Kendal, Jawa Tengah, untuk melihat kelayakan Provinsi Jawa Tengah ini apakah sudah cukup layak untuk mengusulkan menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus," kata Ketua Tim Pansus RUU KEK Sundari Fitriyana saat

dihubungi Parlementaria usai peninjauan lapangan ke Kawasan Pengembangan Industri di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (4/6).

Menurutnya, peninjauan langsung ke Kawasan Pengembangan Industri di Kendal, Jawa Tengah, untuk melihat

keadaan kawasan tersebut dan mencari masukan-masukan terkait dengan pembahasan RUU KEK yang ditargetkan akan selesai sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir.

Dia menegaskan, DPR akan terus mengejar target penyelesaian RUU KEK

karena bulan Oktober 2009 sudah masuk anggota dewan periode yang baru. "Kita khawatir kalau tidak selesai bulan September 2009 akan terkatung-katung RUU KEK ini," katanya. (Iwan)

KOMISI VI MINTA MENEG BUMN SELESAIKAN KASUS SENAMANENEK DENGAN PTPN V

Komisi VI meminta Meneg BUMN untuk segera menyelesaikan kasus Tanah Senamanenek dengan PTPN V dalam waktu sesegera mungkin.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Meneg BUMN Sofyan Jalil yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhidin M Said (F-PG) di Gedung Nusantara I DPR, Senin (8/6).

Muhidin menambahkan, Komisi VI selanjutnya akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, BPN Provinsi, BPN Kampar dan Instansi Pemerintah (Bupati Kampar, Gubernur Provinsi Riau) terkait kasus Tanah Senamanenek.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Meneg BUMN seharusnya bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sebelum berakhirnya masa Kabinet Indonesia Bersatu khususnya dengan masalah Tanah Senamanenek

Hal senada diungkapkan Muhammad Tonas (F-BPD), dia menilai masalah ini sudah dibahas sebelumnya dengan Deputi Kementerian Negara BUMN yang dihadiri Gubernur Riau, Bupati Kampar, Kepala BPN Riau dan Masyarakat Senamanenek yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanuni (F-PPP). Saat RDP tersebut, Kepala BPN mengatakan, tanah tersebut memang diinklapkan kepada Masyarakat Senamanenek, dan tanah itu bukan milik PTPN V karena saat itu tidak ada pembicaraan tentang lahan lagi.

Tonas dalam pertemuan itu mempertanyakan bagaimana tanah yang bukan milik PTPN V bisa dibawa ke pengadilan. "Tanah bukan milik PTPN V koq minta fatwa hukum," tegasnya. Menurutnya, persoalan yang terjadi di

Senamanenek Kabupaten Kampar Riau Meneg BUMN harus dapat menyelesaikannya.

Sementara itu, Refrizal (F-PKS) meminta kepada Meneg BUMN agar waspada kepada orang-orang disekitar Meneg BUMN yang berniat untuk menggagalkan masalah ini yang akhirnya Masyarakat Senamanenek tidak mendapatkan haknya. "kita mengkhawatirkan adanya oknum di kementerian BUMN mengalihkan kasus ini kepada masalah hukum, sehingga masyarakat Senamanenek tidak mendapatkan haknya," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Meneg BUMN Sofyan Jalil mengatakan, memang ini seperti duri dalam daging bagaimana kita menyelesaikan masalah yang

menyangkut kepentingan masyarakat yang luas ini. Saya ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah," kata Sofyan

Menurutnya, kita mengharapkan masalah ini tanpa membawa masalah di kemudian harnya. "Kami telah melepaskan banyak sekali tanah PTPN tetapi dengan keputusan pengadilan, begitu pengadilan mengatakan bahwa ini adalah tanah masyarakat, ya kita lepaskan, dengan demikian kantor Kementerian Negara BUMN akan ada proses yang cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya

Lebih jauh, Sofyan menjelaskan, dalam hal masalah hukum ini tinggal kita minta fatwa saja, bukan gugat hukum. Fatwa hukum ini bisa diberikan oleh pengadilan atau fatwa hukum bisa diberikan oleh BPN yang menyatakan bahwa tanah ini bukan tanah PTPN V tetapi merupakan hak hulaikat masyarakat Senamanenek. (Iwan)

MASYARAKAT INGINKAN DPR KAWAL DEMOKRASI DAN SISTEM POLITIK IDEAL

Ketua DPR Agung Laksono mengharapkan pers dapat menghadirkan berita yang berimbang mengenai DPR sehingga dapat mensosialisasikan kegiatan dewan secara utuh kepada masyarakat.

Pers memiliki peran penting dalam mensosialisasikan hasil keputusan Dewan ke masyarakat. Tanpa pers, masyarakat akan sulit mendapatkan keputusan yang diambil DPR," kata Ketua DPR Agung Laksono dalam acara **Press Gathering** Koordinatoriat Wartawan DPR

RI dengan Ketua DPR di Lembang, Bandung (6/6).

Sebagai lembaga pengawal demokrasi, papar Agung, DPR juga merupakan lembaga yang mengemban aspirasi rakyat. Karena itu peran dan fungsi rekan-rekan pers setiap denyut kegiatan langkah

di parlemen mendapat liputan luas. "Liputan yang berimbang oleh pers merupakan keinginan kita semua," tambah Agung Laksono.

Dia menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya dalam kurun waktu 2004-2009 merupakan DPR dalam masa transisi. Periode ini juga disebut sebagai periode revolusi ledakan harapan, karena besarnya harapan publik terhadap kerja dan kinerja DPR.

"Seluruh komponen bangsa menghendaki agar DPR sebagai salah satu pengawal demokrasi dapat menciptakan sistem politik yang paling ideal," terangnya.

Sistem politik ideal, terang Agung, yaitu sistem politik yang dapat merespon dan menjawab serta ikut menyelesaikan masalah-masalah bangsa melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya yaitu fungsi perundang-undangan, pengawasan dan penetapan anggaran.

Ia menambahkan, kekuasaan DPR saat ini secara konstitusional lebih kuat, namun demikian, bangunan ketatanegaraan atas dasar presidential system sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tetap harus terjaga. Penguatan peran DPR ini adalah wujud dari mekanisme checks and balances dalam hubungan kelembagaan DPR dan Presiden.

"Oleh karena itu, partai-partai politik di parlemen sebagai hasil Pemilu 2009 melalui ketentuan **parliamentary threshold** selain dalam rangka perampingan partai-partai politik untuk memperkuat sistem presidensial, juga diminta tetap fokus pada terbangunnya tata kehidupan demokratis yang cerdas dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Kawal demokrasi

Sementara itu Ketua Tim Kajian Peningkatan Kinerja Dewan Darus Siska menegaskan, pers adalah pilar demokrasi yang sangat penting karena tanpa pers, masyarakat akan sulit mendapatkan keputusan yang diambil DPR.

Dalam paparannya Darul menyebutkan, kerjasama dewan dengan pers harus berimbang dan bersifat simbiosis mutualisme, artinya saling memberikan dukungan satu sama lain.

"Karena tanpa pers kehadiran DPR sebetulnya tidak terlalu banyak memberikan makna, tidak terlalu banyak memberi manfaat dari masyarakat kita," kata Darul Siska.

Ia mengusulkan apabila anggota Dewan Kunjungan Kerja ke luar negeri para wartawan dapat ikut serta melakukan peliputan mengenai kegiatan kunjungan kerja tersebut.

"Ini sangat penting agar wartawan yang berada di DPR juga bisa membandingkan parlemen di luar negeri dengan parlemen di tanah air kita karena itu, jangan dianggap menilai DPR kita dengan persepsi masyarakat kita saja, tapi bisa dibandingkan dengan kegiatan parlemen di luar negeri," jelasnya.

Dia menambahkan, pada tahun yang akan datang kita sudah memiliki anggaran untuk wartawan dan juga disediakan untuk anggota DPR yang baru agar bisa ditingkatkan kegiatan-kegiatan **gathering** semacam ini.

Indikator Kinerja DPR

Terkait dengan masalah indikator apa yang digunakan untuk mengukur kinerja DPR, Darul mengatakan, pihaknya telah membuat tim kajian peningkatan kinerja selama 1 tahun. "Kita sudah merampungkan dan jika ingin lebih lengkap bisa baca di Buku Reformasi DPR," terangnya.

Dia melaporkan, kinerja DPR memang masih lemah di bidang legislasi karena

target penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak diukur sesuai dengan kapasitas masing-masing komisi atau pansus setiap tahunnya. "Kita tidak pernah menghitung, berapa sih kapasitas komisi membuat UU dalam satu tahun, berapa kapasitas pansus, bagaimana beban UU yang sedang kita bahas, pokoknya semangatnya setahun sekian ditetapkan sehingga pencapaiannya rendah," jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, waktu menyusun itu komisi-komisi tidak dilibatkan oleh Badan Legislasi (Baleg). "Misalnya, komisi IV, Komisi V berapa yang dia targetkan tahun itu, tidak pernah ditanya dan Baleg juga hanya menetapkan saja," paparnya.

Untuk itu, saran Darul, DPR seharusnya dalam menyusun RUU yang full inisiatif DPR perlu diperbanyak tenaga ahli. Sedangkan kendalanya hingga kini belum memiliki staf ahli yang memadai, referensi yang memadai, dan tidak punya data yang akurat untuk menyusun UU.

"Jadi kalau teman-teman pergi ke luar negeri mestinya mencari data-data untuk RUU yang diperlukan," pintanya.

Di sisi lain, belum banyak lapisan masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan UU. Ini terkendala kurangnya sosialisasi, mestinya sebelum dibahas diumumkan di media masa. Selanjutnya masyarakat diberi kesempatan dialog dan memberi masukan kepada Komisi atau Pansus yang terkait. (iwan)

KOMISI VII MINTA PERTAMINA BERKOORDINASI DENGAN DEPHUT

Anggota Komisi VII DPR Nizar Dahlan (F-BPD) meminta PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan Departemen Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan guna pengembangan bisnis geothermal Pertamina. Hal tersebut dikatakan Nizar Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan Jajaran Direksi PT. Pertamina, yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG), di DPR, Rabu (10/6).

"Untuk mengembangkan geothermal, seharusnya Pertamina berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan karena menyangkut pemanfaatan hutan," kata Nizar.

Menurutnya, koordinasi dengan Departemen Kehutanan sangat perlu dilakukan oleh Pertamina sebagaimana yang telah dilakukan oleh perusahaan asing seperti PT Chevron yang melakukan pendekatan dengan Dephut RI mengenai pemanfaatan hutan di Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi VII lainnya, Burhanuddin Bur Maras (F-PD) mengakui pengembangan geothermal akan merugikan lingkungan hidup. Tetapi menurutnya, apabila dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang canggih, maka akan menghindari dari kerusakan lingkungan hutan. "Harus menggunakan teknologi canggih agar hutan kita tidak

rusak," ujar Burhanuddin.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Karen Agustiawan menjelaskan, memang masih terdapat kendala dalam pengembangan lapangan panas bumi terkait perizinan dan tarif.

Karena itu menurut Karen, PT. Pertamina sudah memiliki beberapa solusi yang antara lain perlunya kebijakan

pemerintah untuk menentukan tarif sesuai keekonomian proyek, konsistensi kebijakan fiskal dan usaha, kepastian hukum terkait izin penggunaan lahan dalam pengembangan dan optimasi pemberdayaan energi geothermal, serta penyamaan persepsi implementasi perundangan geothermal dan aturan turunannya secara konsisten.(olly)

DPR MINTA PERTAMINA TANGANI SERIUS KEBOCORAN PIPA

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie (F-PAN) meminta PT. Pertamina (Persero) untuk dapat menangani secara serius kebocoran pipa kilang milik Pertamina. Hal tersebut ditegaskan Alvin saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan jajaran Direksi PT. Pertamina, yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG), di DPR, Rabu (10/6).

Saya minta Pertamina melakukan penanganan serius guna menanggulangi kebocoran pipa," tegas Alvin.

Alvin berharap agar bencana di Porong Jawa Timur tidak terulang lagi di tempat-tempat lainnya mengingat sampai sekarang masih terlihat beberapa semburan halus terutama di daerah Muara Enim Sumatera Selatan.

Dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR, Direktur Umum dan SDM PT Pertamina, Waluyo menjelaskan, sebenarnya Pertamina telah melakukan upaya-upaya guna mencegah insiden kebocoran pipa kilang seperti peningkatan inspeksi dengan menggunakan peralatan inspeksi yang memiliki akurasi yang terbaik, peningkatan pemeliharaan pipa kilang, serta peningkatan pengamanan.

Hal lain yang dilakukan Pertamina menurut Waluyo adalah melakukan upaya penanganan dan pemulihan lingkungan yang disebabkan oleh kebocoran pipa yang meliputi menanggulangi dan membersihkan tumpahan minyak di lokasi yang terkena dampak kebocoran.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan verifikasi lapangan agar kerugian terhadap masyarakat dapat dilakukan dan penyelesaian ganti rugi yang memadai, serta melakukan program pemulihan lingkungan dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan mengikutsertakan tim ahli.

Waluyo menambahkan, koordinasi yang dilakukan dengan KMLH tersebut meliputi penggantian habitat yang terkena dampak seperti mangrove, pasir, hutan dan lain-lain.(olly)

PROGRAM EFA BUTUH DUKUNGAN PENUH PARLEMEN

Ketua DPR selaku Presiden Forum Parlemen Asia Pasifik untuk pendidikan (FASPPED) Agung Laksono mengatakan, program education for all (EFA) dapat tercapai apabila adanya dukungan parlemen dengan melaksanakan secara konsisten program EFA Global Action Plan.

Ini merupakan pengembangan strategi komprehensif guna meningkatkan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional demi tercapainya program EFA,"kata Agung Laksono dihadapan delegasi parlemen berbagai negara, di Gedung Nusantara III, Selasa, (9/6)

Pertemuan ini, terang Agung, sangat

penting dan tepat diselenggarakan dalam situasi krisis global karena situasi sekarang sangat berpengaruh bagi sektor pendidikan. "investasi di bidang pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu solusi atas krisis yang terjadi," paparnya.

Dia mengharapkan forum ini dapat

mengadopsi dan melaksanakan Oslo declaration yang telah digulirkan pada Desember tahun lalu. "Deklarasi tersebut mengusung pelaksanaan acting together guna mengimbau masyarakat internasional akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan, menciptakan kesetaraan sebagai prioritas pendidikan, dan peningkatan pendanaan bagi kalangan kurang mampu, serta mempersiapkan guru dan menanamkan sifat pengabdian," katanya.

Agung menambahkan, pertemuan pertama tingkat tinggi pertama ini dapat memberikan arahan bagi parlemen di Asia Pasifik guna memastikan anak-anak, anak muda, wanita dan anak perempuan mendapatkan kesempatan di bidang Pendidikan dan tidak menjadi golongan

tersihkan dari fungsi Dewan dibidang legislasi, pengawasan dan budgeting.

Perwakilan Unesco Mr. Vladimir Kouchnirenko mengatakan, Parlemen memiliki peran dalam mengurangi dampak krisis finansial di Asia dan menciptakan

landasan untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. "Program parlemen untuk pendidikan harus mendapat penekanan dalam menjawab solusi krisis finansial di dunia,"katanya.

Menurut Vladimir, pertemuan ini

sangat penting dalam memperkuat komitmen politik dari parlemen dalam mencapai target EFA dan tujuan Milenium Development Goals. (si)

AMBALAT MILIK INDONESIA, TIDAK PERLU BERUNDING

Tim Kunjungan Kerja Komisi I ke Malaysia yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Yusron Ihza Mahendra (F-BPD), diikuti Anggota Djoko Susilo (F-PAN), Happy Bone Zulkarnain (F-PG), Andreas Pareira (F-PDIP) dan Shidki Wahab (F-PD) menegaskan bahwa Ambalat mutlak milik Indonesia sehingga tidak perlu berunding dengan Malaysia terkait klaim negara itu. Hal tersebut diungkap Ketua Tim saat jumpa pers di Terminal II E Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (12/6).

Dalam keterangannya, Yusron menegaskan tidak perlu ada perundingan lagi tentang Ambalat. Menurutnya dasar hukum yang dimiliki Indonesia terhadap kepemilikan Ambalat sudah jelas. "Bukti-bukti sudah cukup sehingga tidak perlu ada perundingan," ujarnya.

Ketua Tim menegaskan yang diperlukan sekarang adalah pengakuan oleh Malaysia bahwa Ambalat adalah milik Indonesia.

Lebih jauh, ia menjelaskan, bahwa hasil Kunjungan Komisi I ke Malaysia akan dilaporkan ke pemerintah untuk kemudian segera ditindaklanjuti. "Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil-hasil yang telah kami capai," katanya.

Yusron menegaskan, bahwa Tim Kunjungan Kerja Komisi I ke Malaysia tidak berubah pendirian sedikit pun terkait Ambalat. "Sikap kami tidak berubah sedikitpun terhadap Ambalat," tegasnya.

Menurut Yusron, Malaysia sepakat bahwa mereka satu ide dengan kita, bahwa tidak ada kekerasan di Ambalat. Bahkan, menurut keterangan Ketua Tim Yusron Ihza Mahendra, Panglima Tentara Laut Malaysia tidak ingin hubungan negara serumpun rusak karena perselisihan Ambalat.

"Panglima Tentara Laut Malaysia bahkan mengatakan tidak ingin hubungan Indonesia-Malaysia rusak karena anak

buahnya melakukan kesalahan," jelasnya.

Menurut Yusron, pihak Malaysia akan memberikan sanksi terhadap jajaran tentara yang bertugas di perairan Ambalat bila melakukan kesalahan. Negara itu akan memberi sanksi terhadap tentaranya yang melakukan pelecehan terhadap tentara Indonesia.

"Panglima Tentara Laut Malaysia akan menjatuhkan hukuman bagi prajuritnya

yang melakukan pelecehan terhadap tentara Indonesia," jelas Yusron seraya menambahkan Malaysia meminta maaf terhadap Indonesia atas pelanggaran batas wilayah yang dilakukan tentara Malaysia.

Lebih jauh Yusron menjelaskan secara politik, Indonesia-Malaysia telah mencapai kesepakatan politik terkait Ambalat. Ia menegaskan pasukan TNI yang ada di wilayah Ambalat tidak akan dikurangi, karena wilayah tersebut masuk dalam NKRI.

"Untuk apa kita menarik pasukan dari wilayah kita sendiri. Ambalat adalah milik kita dan hak kita," katanya.

Sementara itu, Andreas Pareira dalam keterangannya menjelaskan bahwa hambatan dari perundingan ini karena Deplu Malaysia mengganti Ketua Tim Perundingnya. "Ini menjadi hambatan dan kita minta kepada Malaysia supaya mempercepat proses perundingan dengan demikian lebih cepat kita ketahui batas wilayah kita. Sebelum ada garis batas yang jelas, kita tidak akan melakukan eksplorasi," kata Andreas. (bs)

INDONESIA DUKUNG PERDAMAIAN SEMENANJUNG KOREA

Bangsa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Korea Utara untuk terciptanya perdamaian dan Keamanan di Semenanjung Korea. Perdamaian dapat diwujudkan dengan adanya rekonsiliasi nasional.

Demikian Disampaikan Ketua DPR RI Agung Laksona saat menerima Duta Besar Korea Utara Jong Chun Gun, Senin (8/6) di Ruang Kerjanya.

Agung Laksona Juga mengharapkan tidak adanya campur tangan negara lain yang akan menambah keruh masalah.

Jong Chun Gun menyampaikan pengembangan nuklir Korea Utara tidak

diperuntukan menyerang Negara lain. "Pengembangan persenjataan nuklir untuk pertahanan kedaulatan Negara," tegas Duta Besar Korea.

Rakyat Korea juga menginginkan perdamaian dunia. Jong mengajak kepada Negara-negara di Dunia untuk bekerjasama mewujudkan perdamaian.

Negara Korea Utara terpaksa mengembangkan persenjataan nuklir karena adanya ancaman dan perlakuan diskrimitatif dari Negara lain. "Korea Utara akan melakukan apasaja terhadap ancaman Negara lain," katanya. (as)

BPK SERAHKAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DPR RI menerima hasil pemeriksaan Badan Pemerikasa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008.

Hasil pemeriksaan LKPP tersebut diserahkan Ketua BPK RI Anwar Nasution Kepada Ketua DPR RI Agung Laksono dalam Sidang Paripurna, Selasa (9/6) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Mengenai opini laporan keuangan Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang merupakan elemen utama LKPP, Anwar Nasution menyampaikan adanya perkembangan opini dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan pada berbagai Instansi Pemerintah.

Jumlah Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat dengan pesat, dari 7 pada tahun 2006 menjadi 16 pada tahun 2007 dan 34 pada tahun 2008.

Selanjutnya, Anwar mengatakan telah terjadi perbaikan opini pemeriksaan atas laporan Kementerian Negara atau Lembaga Negara yang besar seperti Departemen Keuangan, Departemen Pendiidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Perdagangan. Yang sebelumnya, opini pemeriksaan atas laporan keuangan keenam departemen besar tersebut adalah disclaimer dan sekarang telah meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian. (WDP).

Realisasi Pendapatan dan belanja pada Tahun 2008 menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2007. Pendapatan naik sebesar 39% dari semula sekitar 708 triliun menjadi sekitar Rp.982 triliun.

Pada sisi pengeluaran, belanja Negara pada tahun 2008 telah mengalami kenaikan sebesar 30% yakni dari sekitar Rp.758 triliun menjadi sekitar Rp.986 triliun. Sehingga menurut Anwar Nasution, defisit anggaran turun menjadi sekitar Rp 4 triliun dari semula 49,8 triliun di tahun 2007.

Selain itu, Anwar Nasution, menjelaskan inventarisasi kekayaan Negara juga penting untuk mengetahui kesiapan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Kementerian atau Lembaga Negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kementerian Negara atau Lembaga Negara menegaskan untuk menyajikan aset yang dapat mendukung kegiatan operasional sebagai bagian dan aset tetap di neraca. Sementara aset yang sudah rongsokan dan tidak dapat mendukung operasional Kementerian Negara atau Lembaga Negara harus disajikan sebagai aset lain-lain.

Sangat penting pemisahan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi yang terbelakang, sebagai contoh, neraca Departemen Partahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat penguasaan asetnya sebesar sekitar Rp.163 triliun atau 24 persen dari total aset tetap Pemerintah, sekitar Rp.47 triliun atau 29 persen dari

aset tetap Departemen Pertahanan dan TNI. Itu adalah berupa peralatan dan mesin berupa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Unruk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset tersebut perlu diketahui mana yang masih efektif digunakan dan mana yang sudah menjadi barang rongsokan ataupun yang teknologinya sudah jauh ketinggalan.

Ketidak cermatan dalam melaporkan kondisi alutsista ini akan mengakibatkan DPR, Pemerintah, dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat (misleading) dalam mengambil keputusan atas aset tetap departemen pertahanan dan TNI.

Dengan dapat diatasinya kelemahan tersebut, diharapkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pengoperasian peralatan dan mesin dilingkungan Departemen Pertahanan dan TNI dapat dihindari yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan Departemen Pertahanan dan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (as)

PEMERINTAH HARUS TEGAS TERHADAP MALAYSIA

Ketua DPR RI HR Agung Laksono meminta supaya pemerintah lebih bersikap tegas terhadap provokasi yang dilakukan Malaysia di perairan Ambalat. Hal itu diungkapnya sebelum menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Maroko Mr. Mohamed Majdi di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (11/6). "Pemerintah harus lebih keras terhadap Malaysia," katanya.

Dalam keterangannya, Ketua DPR tidak terima bila kapal milik Malaysia memasuki perairan Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia. Bahkan kapal milik negara tetangga itu seringkali memasuki perairan Ambalat.

"Kita tidak terima dengan kondisi ini.

Pemerintah jangan diam saja," tegas Agung.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil tindakan yang sesuai dengan pergaulan dunia internasional. "Harus ada reaksi-reaksi dalam Hubungan Internasional," tuturnya.

Lebih jauh, Ketua DPR mendesak

pemerintah lebih tegas terhadap Malaysia, karena bukan pertama kali ini negara itu meremehkan Indonesia. Bahkan, sebagai negara berdaulat, Indonesia sering kali direndahkan Malaysia.

“Selama ini kita selalu direndahkan sebagai bangsa, terutama dalam persoalan TKI dan Ambalat. Seharusnya apabila ada kapal Malaysia yang masuk perairan kita, walaupun seinci, tembak saja,” katanya.

Seperti diketahui, menanggapi persoalan perairan Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai teritorial mereka, pemerintah selama ini masih belum bersikap tegas.

TNI sebagai pihak yang berdiri di garis depan perbatasan, masih terus menunggu komando pemerintah, meski kapal perang Malaysia berulang kali masuk ke batas perairan Indonesia, bahkan nelayan lokal

pun beberapa kali dikejar-kejar tentara Malaysia.

“Karena ini sudah berkali-kali. Kalau perlu pemerintah mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan Malaysia, melihat sikap Malaysia yang kurang mencerminkan persahabatan sebagai negara serumpun,” kata Agung. (bs)

DPR SAHKAN RUU BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN JADI UNDANG-UNDANG

Dengan mulus DPR sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (B2L2) menjadi Undang-Undang. Mengingat keempat symbol tersebut merupakan identitas bangsa maka perlu diperkuat pengaturan dan penyeragaman dalam pelaksanaannya.

Hal itu terungkap saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR H.R Agung Laksono, di gedung Nusantara II, Selasa (9/6).

Juru bicara Fraksi Golkar Murhanawati Syamsi menuturkan bahwa bahasa resmi Negara adalah bahasa Indonesia. Secara imprevatif, RUU ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan dalam atau di luar negeri.

“Bahasa Indonesia juga wajib digunakan untuk komunikasi dalam forum-forum nasional dan internasional di Indonesia,” ujarnya.

Terkait bendera negara Merah Putih juru bicara dari Fraksi PDIP Cyprianus Aoer mengungkapkan jika RUU mengatur teknik dan tata laksana yang standar untuk bendera negara serta tata cara pemasangan di kendaraan.

Fraksi ini juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan bendera yang terkesan tidak ada penghormatan dan penghargaan. Dimulai dari dijadikan atribut kampanye yang diperlakukan sesuka hati, dijadikan kostum aneka model, maupun saat beremonstrasi.

Oleh sebab itu, fraksi PDIP mendesak pemerintah, pemerintah daerah, petugas keamanan, dan semua pihak untuk menertibkan sesuai prinsip standar yang diatur dalam UU ini nantinya.

Dengan disahkannya RUU B2L2 menjadi UU Nurul Qomar juru bicara dari Fraksi Demokrat, dapat dijadikan sebagai alat legitimasi atau jati diri bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, sekaligus menjadi bentuk pengakuan untuk merdeka setara dan bebas aktif dalam pergaulan diantara bangsa dan negara lain.

RUU B2L2 juga bermakna untuk menguatkan persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Selain itu juga dapat menjadi dasar keseimbangan untuk selalu kembali hanya atas dan untuk Indonesia, kembali atas berbagai friksi dan konflik etnis kedaerahan yang muncul dalam dimensi social dan politik Indonesia.

Juru bicara Fraksi PPP Muchtar Aziz dan juru bicara Fraksi PDS Arisman Zagoto menegaskan jika pemerintah tidak boleh lagi memandang sebelah mata terhadap keberadaan karya sastra tetapi harus lebih membina, mengembangkan dan melindunginya.

Konsekuensi lanjutnya, Pemerintah dan DPR harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pertumbuhan yang makin berkualitas bagi bahasa dan sastra kita. Kelak, tidak boleh ada lagi warga bangsa yang merasa rendah diri jika berbahasa Indonesia tanpa mencampurkannya dengan bahasa asing.

Sementara itu, Fraksi PAN melalui

jubirnya Joko Santoso memandang perlu segeranya disosialisasikan sehingga dapat mengurangi resistensi seperti kasus blok ambalat. Bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan lambing tersebut harus diberikan sanksi yang tegas, agak menimbulkan efek jera.

Senada diatas, jubir fraksi PKS Aan Rohana mmemandang pentingnya mempertahankan identitas nasional bangsa Indonesia dari ancaman globalisasi sehingga diperlukan pendekatan sistem ketahanan nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia dalam perspektif ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang meliputi segala aspek yang dikedepankan dalam ketahanan nasional.

Muchotob Hamzah jubir F-KB berharap jangan sampai maksud dan tujuan yang baik dari RUU ini nantinya termasuk pembatasan-pembatasan atas apa yang boleh dan tidak boleh dalam penerapannya menjadi sesuatu yang membatasi siapapun mengekspresikan rasa kecintaan dan kebanggaan kepada negaranya.

Juru bicara Fraksi BPD Timotius T. Darsoatmodjo dan juru bicara fraksi PBR Bahran Andang memberikan apresiasi berkaitan dengan adanya ketentuan larangan menodai, menghina dan merendahkan kohormatan lambing negara, larangan menggunakan lambing negara yang rusak membuat duplikat

lambang perorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai

lambang negara dan larangan untuk menggunakan lambing negara untuk keperluan yang menyimpang dari

ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 RUU ini. (da)

KOMISI VII MINTA MENEG LH KOORDINASI DENGAN MA

Komisi VII DPR meminta agar Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terhadap adanya program sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, di DPR, Senin (8/6).

Komisi VII minta Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan MA dalam rangka program sertifikasi lingkungan hidup," tegas Airlangga.

Permintaan Komisi VII DPR ini terkait dengan tuntutan hukum terhadap kasus lingkungan hidup yang mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008 yaitu sebanyak 68 kasus. Namun, vonis persidangan belum memuaskan dan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.

Dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR, Meneg LH Rachmat Witoelar menjelaskan, dalam rangka penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, KNLH telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengembangan program sertifikasi hakim lingkungan.

Hal tersebut menurut Rachmat agar perkara-perkara lingkungan hanya ditangani oleh hakim-hakim yang telah bersertifikat

Rachmat menambahkan, pola hakim bersertifikat ini dapat diterapkan di tingkat pengadilan pertama yaitu Pengadilan Negeri dan PTUN dan pengadilan banding yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Selain itu, kerjasama ini juga telah dikembangkan bersama pihak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengembangkan penegakan hukum lingkungan terpadu. "Selain itu juga dikembangkan optimalisasi PPNS dan PPLH," jelas

Rachmat.

Rachmat juga mengakui, berbagai faktor yang mempengaruhi pemberian efek jera kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup antara lain sanksi yang dijatuhkan tidak memadai dan pengaturan sanksi dalam perundang-undangan tidak menetapkan hukuman minimum. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan penguatan terhadap beberapa aspek

tersebut, maka Pemerintah akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya revisi UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hak inisiatif DPR, terutama penguatan pada pasal-pasal yang mengatur tentang penegakan hukum lingkungan. Selain itu dilakukan juga pengembangan program penegakan hukum satu atap sebagai sarana koordinasi penyidik PPNS, penyidik Polri, dan Jaksa Penuntut Umum, serta program peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Terkait dengan masih banyaknya impor limbah B3 secara illegal seperti yang ditanyakan Komisi VII DPR, Rachmat Witoelar mengatakan, KNLH telah melakukan kerjasama dengan Bapedal untuk meminta agar perusahaan mere-eksport limbah B3 tersebut dan meminta kepada Negara pengimpor untuk menerima kembali limbah B3. (olly)

DPR SETUJUI RUU INISIATIF KOMISI VII DPR MENJADI USUL INISIATIF DPR

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI H.R. Agus Laksono menyetujui Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi VII DPR Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi RUU DPR RI. Hal tersebut diungkapkan masing-masing juru bicara fraksi pada agenda pembacaan pandangan fraksi, di Ruang Paripurna DPR, Selasa (9/6).

Fraksi Partai Golkar dengan juru bicaranya M. Idris Laena yang menyatakan siap membahas lebih mendalam RUU ini berharap undang-undang ini mampu mengatur semua pihak yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemerintah, masyarakat bisnis dan masyarakat luas. F-PG juga berharap undang-undang ini mampu menjadi landasan hukum yang lebih sesuai dengan semangat zaman kuat dan komprehensif bagi pengelolaan lingkungan hidup terkait upaya pemanfaatan fungsi lingkungan hidup bagi

peningkatan kualitas kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Juru bicara F-PDS, Leander Ohoiwutun dalam pandangan fraksinya menyatakan penurunan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk didalamnya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global. F-PDS juga berpandangan bahwa RUU ini telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI, karena dalam RUU ini telah diatur berdasarkan

prinsip-prinsip dan teknik pembuatan undang-undang yang benar.

F-PBR dengan juru bicaranya Fachruddin Djaya, berpandangan bahwa UU No.23 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan payung hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, F-PBR beranggapan saat ini diperlukan produk perundang-undangan dengan pendekatan desentralistik yang mengoptimalkan keterlibatan pemerintah daerah, serta upaya penegakan good environmental governance.

Sementara itu, Nizar Dahlan, juru bicara F-BPD berpandangan RUU usul Inisiatif DPR ini merupakan langkah maju dimana telah menghadirkan pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, karena selama ini undang-undang yang ada belum mengatur hal tersebut.

Juru bicara F-PKS Wahyudin Munawir memandang perlunya segera merevisi UU No. 23 Tahun 1997 mengingat banyaknya keputusan yang membebaskan perusahaan dari jeratan pidana lingkungan

walaupun mereka telah jelas-jelas melakukan kejahatan lingkungan.

F-KB menyatakan persetujuannya dengan mempertimbangkan bahwa RUU ini memiliki substansi yang sangat penting dan bersifat strategis. F-KB juga meminta paling tidak ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan atau tidak, yaitu pemberdayaan masyarakat, transparansi, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan terhadap hak masyarakat adaptif dan masyarakat setempat, konsistensi dan harmonisasi, serta daya penegakan.

Sedangkan F-PAN dengan juru bicaranya Tjatur Sapto Edy menyampaikan pokok-pokok pandangan yang antara lain, perlunya perubahan paradigma bahwa kejahatan lingkungan bukan lagi kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Untuk itu, sudah saatnya kasus-kasus lingkungan hidup ditangani secara khusus pula oleh para penegak hukum dengan keahlian khusus dan bersertifikat. Selain itu, perlu perubahan rumusan tindak pidana dari materiil menjadi tindak pidana

formil.

F-PPP dengan juru bicaranya ledil Suryadi berpandangan bahwa masalah lingkungan hidup telah menjadi isu global dan menjadi perhatian masyarakat dunia. Oleh karena itu, masalah lingkungan hidup juga harus mendapat perhatian umat manusia demi kelangsungan hidupnya sekarang, dan demi masa mendatang.

Juru bicara F-PD Bruno Kaka Wawo dalam pandangan fraksinya berpandangan bahwa revisi terhadap undang-undang ini harus dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh bagi kepentingan keselamatan lingkungan hidup dan berupaya meminimalisasi kepentingan dunia usaha yang merugikan kepentingan dan keselamatan lingkungan hidup.

Fraksi PDIP dengan juru bicaranya Isma Yatun berpandangan, penyelarasan UU baru ini harus segera disinkronisasikan dan diharmonisasikan pula dengan berbagai undang-undang lain yang terkait, untuk merancang arsitektur system pembangunan nasional yang terencana dengan penataan ruang wilayah di seantero nusantara berjangka panjang sekurang-kurangnya sampai tiga generasi ke depan sejak masa kini. (olly)

KOMISI VIII DPR AKAN PERJUANGAN ALOKASI ANGGARAN BAGI DIRJEN BJS DEPSOS

Komisi VIII DPR akan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran yang lebih signifikan bagi Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial (Dirjen BJS Depsos).

Komisi VIII DPR akan memperjuangkan anggaran Dirjen BJS Depsos dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujar Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen BJS Depsos, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (8/6)

Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar mengatakan, dalam penyusunan Program RAPBN 2010 seharusnya Dirjen BJS Depsos memperhatikan penyusunan program dan anggaran yang dilandasi dengan adanya kesesuaian data sasaran program, target

yang hendak dicapai, sehingga mempermudah dalam monitoring dan evaluasi.

Pada kesempatan tersebut anggota Komisi VIII dari PKS, Yoyoh Yusroh meminta perhatian Dirjen BJS Depsos untuk menangani keluhan pekerja migran karena, banyak sekali kasus menimpa pekerja Indonesia di negara lain.. "kasus mereka banyak sekali, apakah ada koordinasi antara Dirjen BJS Depsos dengan instansi terkait untuk masalah TKI ini," tanyanya

Sedangkan anggota Komisi VIII dari FPKS, DH Al Yusni, menyampaikan perlunya program yang diarahkan bagi masyarakat

Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah langsung dengan negara tetangga guna mengatasi kesenjangan sosial.

Pada kesempatan tersebut, RDP Komisi VIII DPR juga meminta Dirjen BJS Depsos untuk mencermati beberapa program dan anggaran yang memiliki kemiripan dengan sektor lain sehingga diharapkan dapat dilakukan secara sinergis dan harmonis untuk menghindari terjadinya duplikasi dan potensi penyimpangan.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen BJS Depsos, Toto Utomo BS menjelaskan RAPBN 2010 pagu indikatif Dirjen BJS Depsos sebesar Rp 3.926 Triliun, sementara dari pagu indikatif tersebut hanya disetujui Rp 1.637 Trilyun atau naik sebesar 0.003% dibandingkan tahun 2009. (sc)

KETUA DPR PERSILAHKAN KPK GELEDAH RUANGAN ANGGOTA DEWAN

Ketua DPR Agung Laksono mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan pengeledahan terhadap sejumlah ruangan anggota Dewan yang diduga menerima suap saat pemilihan Gubernur Senior BI Miranda Gultom.

Menurut Agung, pengeledahan sudah ada prosedur bakunya karena itu tinggal lapor ke pimpinan Dewan kemudian proses pengeledahan bisa didampingi oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. "untuk pengeledahan DPR tidak ada masalah silahkan saja karena sudah ada

prosedurnya," papar Agung saat ditanya oleh wartawan, di Gedung DPR, Kamis, (11/6)

Dia menambahkan, Badan Kehormatan harus berkordinasi dengan KPK guna memperdalam dan melakukan konfirmasi terhadap kasus menyusul ditetapkannya empat anggota dewan

sebagai tersangka.

Seperti kita ketahui, terdapat anggota dewan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda L Goeltom. Keempat orang tersebut adalah HY, DMM, UJ, dan ES.

Agung menegaskan apabila ada orang yang berasal dari Partai Golkar dinyatakan bersalah maka dirinya selaku Wakil Ketua Partai Golkar akan segera menindak tegas pelakunya. (si)

KOMISI XI DPR DUKUNG OPTIMALISASI ANGGARAN DEPKEU

Komisi XI DPR mendukung optimalisasi penyerapan anggaran Departemen Keuanan dalam APBN 2009.

Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Hafid Zawawi, di Gedung Nusantara I, Senin malam, (8/6).

"Komisi XI DPR juga meminta kepada Menteri Keuangan untuk meningkatkan kinerja dalam implementasi program sehingga penyerapan angrgan dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu," kata Hafid Zawawi.

Dia mengatakan, DPR terus mendukung upaya optimalisasi anggaran melalui penghematan dengan cara optimalisasi belanja barang dan jasa. "Dengan demikian penghematan tersebut dapat digunakan untuk pengurangan defisit anggaran," terangnya.

Menurutnya, pemerintah bersama dengan DPR telah sepakat bahwa penghematan tidak mengorbankan program prioritas Departemen Keuangan serta mempertajam akurasi penyerapannya.

Pada kesempatan tersebut, Departemen Keuangan mengajukan anggaran 2010 sebesar Rp 15,282 triliun.

KOMISI XI DPR TUNDA ANGGARAN SENSUS PENDUDUK 2010

Komisi XI DPR menunda sementara anggaran Sensus Penduduk 2010 sebesar 4 Triliun Rupiah sebelum adanya rapat kordinasi antara BPS dengan instansi lainnya yang memiliki anggaran sejenis.

Saya mengusulkan anggaran sensus penduduk di hold dahulu sebelum adanya rapat kordinasi dengan instansi lain seperti depdagri yang memiliki anggaran serupa," terang anggota DPR dari PAN Rijal Jalil saat RDP dengan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Walman Siahaan, di Gedung Nusantara I, Selasa

Dari jumlah tersebut, Rp 5,428 triliun merupakan anggaran remunerasi dalam bentuk TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara).

Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan awalnya anggaran yang akan diajukan adalah Rp 15,481 triliun atau naik 0,01 % dari tahun lalu.

"Karena ada optimalisasi dipotong Rp 198,500 miliar menjadi Rp 15,282 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan anggota Dewan. (si)

sore, (9/6).

Menurut Rijal, harus ada rapat gabungan yang memastikan siapa yang berwenang melakukan sensus atau penyelenggara surveynya. "Kita mengharapkan DPR jangan menjadi stempel pemerintah saja dan membuat kisruh dikemudian hari," tegasnya.

Dia menambahkan, Komisi XI DPR

harus mengundang Menteri Keuangan terkait penyelenggara sensus kependudukan ini. "jangan sampai adanya anggaran yang tumpang tindih program antar instansi," katanya.

Saidi Butar-Butar (PD) mengatakan, hal ini harus dikaji kembali karena beberapa Departemen mempunyai anggaran serupa seperti Depdagri, bahkan Gubernur, Bupatipun memiliki anggaran sensus. "Ini harus kita satukan dahulu semua anggaran sensus," katanya.

Denny Sultani Hasan dari Demokrat mengatakan, DPR harus tahu dahulu sejauhmana Depdagri dan BPS melakukan survey sensus ini. "Kita meminta satuan tiganya untuk perbandingan nanti," paparnya.

Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, untuk biaya sensus penduduk 2010 sebesar Rp4 triliun dikarenakan tingginya permintaan BPS untuk anggaran 2010. "Sensus penduduk di 2010 yang memakan biaya Rp4 triliun adalah kewajiban BPS sesuai UU di mana BPS wajib menyiapkan statistik dasar kependudukan setiap 10 tahun sekali," terangnya.

Menurutnya, sensus penduduk 10 tahun sekali ini dinilai yang paling lama dibandingkan dengan negara maju yang hanya berkisar lima tahun. Tingginya biaya sensus di Indonesia kembali menjadi alasan mengapa sensus penduduk di Indonesia dilakukan 10 tahun sekali.

Selain itu, dia menilai sensus penduduk di Indonesia terbilang yang paling tua, di mana sensus sendiri pernah dilakukan sejak 1990 dan sebelum kemerdekaan. "Cakupan sensus penduduk 2010 ini akan dilakukan di 33 provinsi, 493 kabupaten, 6.523 kecamatan, 88.361 desa, dan melibatkan petugas lapangan sebanyak 700 ribu orang," katanya.

Dia menambahkan, hasil dari sensus penduduk 10 tahunan ini dimaksudkan untuk memperbaharui dasar-dasar dan parameter kependudukan, sebagai basis utama proyeksi penduduk dekade 2010-2020, sebagai pantauan kinerja pencapaian millenium development goals (MDGs) dan juga sebagai penyediaan data targeting untuk program kemanusiaan bagi pemerintahan baru. (si)

KOMISI XI DR TUNDA RDP PENYELESAIAN SEMEN KUPANG

Komisi XI DPR menunda RDP dengan Dirut Bank Mandiri, Dirjen Kekayaan Negara Sesmeneg BUMN, PT PPA dan Dirut Semen Kupang dikarenakan tidak hadirnya pimpinan di Instansi tersebut.

Terus terang saya kecewa karena ketidakhadiran Sesmeneg BUMN dan Dirut Bank Mandiri karena itu saya meminta rapat ini ditutup dan ditunda," Tegas Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar, saat RDP dengan instansi tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Walman Siahaan, di Gedung Nusantara I, Rabu, (10/6).

Menurut Mekeng, mereka yang hadir disini tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan terhadap nasib Semen Kupang. "ini bukan hanya rapat biasa tetapi harus ada keputusan yang diambil, saya menyadari banyak tekanan dari manajemen Semen Kupang menyangkut nasib ratusan karyawan yang tidak dibayar gajinya," katanya.

Dia menambahkan, hal ini merupakan pelecehan terhadap instansi DPR karena ketidakhadiran para pengambil kebijakan.

"Kita harus jadwal ulang rapat ini, karena sebagai pemegang saham pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib karyawan Semen Kupang," paparnya.

Dia mengatakan, ketidakhadiran para direksi dan pemangku kebijakan sebagai bentuk tidak adanya perhatian terhadap Semen Kupang. "Ini jangan dilihat semen kupang perusahaan kecil jadi tidak diperhatikan, perusahaan yang besar sekalipun sering tidak diperhatikan oleh pemerintah," katanya.

Setelah itu, beberapa anggota juga menyampaikan hal senada agar rapat ditunda sampai hadirnya para direksi. selanjutnya, rapat ditutup oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Walman Siahaan pada pukul 3.30 WIB dengan mengetok palu dan menyampaikan rapat ditunda hingga hadirnya para undangan tersebut. (si)

KOMISI XI SETUJUI ALOKASI ANGGARAN BAPENAS SEBESAR RP 558 MILIAR

Komisi XI DPR menyetujui alokasi anggaran pagu indikatif Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 558.3 Miliar.

Berkaitan dengan penyerapan anggaran 2009 lalu, Komisi XI DPR meminta Kepala Bapennas tingkatkan penyerapan anggaran sehingga dapat tepat waktu dan efektif," kata Ketua Komisi XI DPR Hafiz Zawawi menyampaikan kesimpulan Raker dengan Menteri Negara PPN/Bapennas Paskah Suzetta, di Gedung Nusantara I, Senin, (8/6)

Dia mengatakan, Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya peningkatan SDM di Lingkungan Kementerian Bapenas. "Ini bertujuan menciptakan keahlian di segala bidang sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi birokrasi," katanya.

Dia menambahkan, Komisi XI DPR akan mengusulkan kepada panitia anggaran untuk menjadi prioritas dan

dialokasikan dalam pagu anggaran 2010 nanti.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, anggaran yang diajukan untuk program tata kelola pemerintahan 2010 naik signifikan sebesar Rp 142,8 miliar dari Rp 69,7 miliar tahun ini.

Dia mengharapkan, DPR bisa menyetujuinya sehingga bisa

meningkatkan kinerja birokrasi. "Salah satu yang menjadi program prioritas antara lain pelaksanaan reformasi birokrasi di Bappenas termasuk penerapan tunjangan kinerja," ujarnya.

Anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara diusulkan tidak berubah, sama dengan tahun 2009 yaitu Rp 3,5 miliar. selain itu, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan diusulkan sebesar Rp

251,859 miliar dari sebelumnya Rp 188,344 miliar.

Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur diusulkan menjadi Rp 140 miliar dari sebelumnya Rp 111,2 miliar.

Sementara, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara diusulkan sebanyak lebih kecil dari tahun ini sebesar Rp 20,06 miliar dari sebelumnya Rp 20,3 miliar. (si)

PANGAR SEPAKATI ASUMSI RAPBN 2010

Panitia Anggaran DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 5-6 persen didalam RAPBN 2010.

Menurut Wakil Ketua Pangar DPR Harry Azhar Azis, DPR mengharapkan pemerintah bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga PDB 2010 dapat mencapai 7 persen atau lebih tinggi dari asumsi RPABN 2010. "Pangar mengharapkan pemerintah bisa mencapai

target 7 persen,"terangnya seusai Rapat Panja Asumsi RAPBN 2010, di Gedung Nusantara I, Senin, (8/6)

Selain pertumbuhan ekonomi, Panja Asumsi, Pendapatan dan Pembiayaan RAPBN 2010 pada 8 Juni 2009 menyepakati Inflasi sebesar 4-6 persen, ICP US\$50-70 per barel, Suku bunga SBI 3 bulan 6-7,5 persen, Nilai tukar rupiah Rp 9.500-10.500 per US\$ dan Lifting minyak

960 ribu barel per hari.

Dia menambahkan, DPR juga mengharapkan lifting minyak bisa naik mencapai 970 ribu barel perhari.

Dengan disetujuinya asumsi RAPBN 2010, maka angka definitif RAPBN 2010 akan diserahkan pemerintah melalui Nota Keuangan Presiden untuk APBN 2010 yang akan disampaikan di rapat paripurna DPR 15 Agustus 2009 nanti. (si)

BAWASLU DIMINTA TINDAK TEGAS APARATNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Komisi II DPR RI meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak tegas aparat-aparat dibawahnya yang melakukan tindakan pelanggaran. Komisi II menemukan ada anggota Panitia Pengawas (Panwas) yang bekerjasama dengan Ketua PPK untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap hasil penghitungan suara.

Hal itu dikemukakan Yasonna H. Laoly (F-PDIP), pada saat rapat dengar pendapat dengan Bawaslu, Rabu (10/6) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP) didampingi Wakil Ketua Komisi II lainnya Sayuti Asyathri (F-PAN).

Laoly mengatakan, terjadinya penggelembungan suara, hilangnya formulir C1 dan berbagai money politik lainnya hendaknya tidak terulang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Dikatakannya, pada Pemilu Presiden

yang akan datang kalau ada PPS maupun PPK yang tidak membuat pengumuman dan tidak menyerahkan hasil berita acara penghitungan suara kepada saksi-saksi atau tidak mengumumkan, petugas ini harus dilaporkan karena telah melakukan tindak pidana.

Karena seperti pengalaman Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu, mencari-cari formulir C1 itu sulitnya luar biasa, bahkan ada C1 siluman yang berada dimana-mana.

Oleh karena itu, kata Laoly, di sini diperlukan ketegasan aparat Panwas dalam

mengawasi secara ketat proses penghitungan suara ini. Dalam hal ini, petugas lapangan dan Panwas mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawal proses penghitungan suara di tingkat paling bawah.

Memang disadari bahwa godaan untuk Panwas didaerah ini besar sekali, apalagi jika dihadapkan pada masalah money politik. Sehingga banyak terjadi jual beli suara pada pelaksanaan Pemilu legislatif lalu.

Yasonna mengingatkan, pada pelaksanaan Pileg godaan itu besar tapi potensi konflik besar juga. Namun untuk Pemilu Presiden, godaan dan konflik ini akan jauh lebih besar lagi. Karena Pilpres merupakan ajang pertarungan harga diri partai dan harga diri calon-calon yang ingin mempengaruhi bagaimana bangsa ke depan.

Senada dengan itu, Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menambahkan, sebetulnya Ketua Bawaslu sudah cukup nyaring menyuarakan kepada jajarannya. Namun hendaknya, nyaringnya suara Ketua dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu ini juga sejalan dan sama dengan jajaran Panwas di tingkat paling bawah.

Sebetulnya, kata Jazuli, hilangnya formulir C1 dan sulitnya mendapatkan C1 menjadi bagian dari pengawasan yang harus dilakukan Bawaslu.

"Kalau genderangnya yang nyaring di atas sementara dibawah tidak ya tentunya pelanggaran-pelanggaran itu akan tetap ada," kata Jazuli. Untuk itu, dia meminta Bawaslu melakukan kontrol yang serius kepada seluruh jajarannya. "Ini harus betul-betul dilakukan, jangan sampai kisruh Pileg yang lalu akan terulang pada Pilpres mendatang," tambahnya.

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini mengatakan, untuk pemilu mendatang pada intinya Bawaslu bersama jajaran pengawas pemilu di seluruh jenjang telah menyiapkan diri secara lebih baik.

Pada pengawasan Pemilu Presiden kali ini, Bawaslu tetap berpegangan pada tiga langkah strategi pendekatan pengawasan, yaitu pengawasan pasif, pengawasan aktif dan pengawasan partisipasif.

Dia menambahkan, beberapa minggu sebelum jatuhnya jadwal pelaksanaan tahapan pemilu, selalui didahului dengan penyiapan regulasi pengawasan pada setiap tahapan.

Setiap regulasi yang sudah ditetapkan disosialisasikan kepada segenap peserta pemilu. Dan sebelumnya didahului langkah bimbingan teknis kepada segenap anggota Panwaslu provinsi dalam suatu rapat kerja atau melalui pelatihan-pelatihan yang khusus digelar untuk itu.

Selanjutnya, Panwaslu provinsi akan menggelar forum yang sama kepada Panwaslu kabupaten/kota hingga pada jenjang di tingkat paling bawah dalam unit Panwaslu kecamatan dan PPL (Petugas Pemilu Lapangan).

Khusus untuk Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), bimbingan teknis dilakukan melalui metode surat menyurat melalui email atau kontak langsung melalui sarana komunikasi yang dimiliki.

Bahkan, kata Nur Hidayat, sosialisasi ini juga dilakukan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

Sejauh ini, hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada tahapan Pemilu Pilpres, Bawaslu telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran salah satu peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Penyidik Mabes Polri pada Sabtu 6 Juni yang lalu.

Peserta Pemilu dimaksud diduga telah melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU mengingat

penetapan pasangan calon oleh KPU baru dilakukan pada tanggal 29 Mei 2009 dan tahapan kampanye baru dimulai 2 Juni 2009.

Laporan yang diajukan Bawaslu terkait dengan acara yang mereka gelar pada 30 Mei 2009 di Jakarta serta yang disiarkan secara penuh oleh dua lembaga penyiaran. Bawaslu menilai kegiatan tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (tt)

DEWAN MEMPERTANYAKAN LEGITIMASI HASIL PEMILU LEGISLATIF

Komisi II DPR RI mempertanyakan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) legitimasi hasil pelaksanaan Pemilu Legislatif yang lalu sehubungan dengan banyaknya kasus yang terjadi sehingga merugikan banyak calon.

Pertanyaan ini diajukan Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) sesaat setelah Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP) membuka rapat dengar pendapat dengan Bawaslu, Rabu (10/6) di gedung DPR.

Sayuti mengatakan sebelum Ketua Bawaslu membicarakan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan pada Juli mendatang, sebaiknya melaporkan terlebih dulu hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu Legislatif lalu.

"Kita jangan membicarakan masalah anggaran dan pengawasan Pilpres, sebelum Bawaslu menjelaskan legalitas dari hasil Pemilu 2009," kata Sayuti.

Rencananya, agenda rapat pagi itu selain membahas masalah RAPBN 2009, juga membahas masalah aktual terkait dengan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sayuti menambahkan, banyak orang mengatakan pelaksanaan Pemilu Legislatif lalu terburuk sepanjang masa reformasi. Kenyataan ini dapat dilihat dengan banyaknya jual beli kertas suara, terjadinya penggelembungan suara, hilangnya

formulir C1 dan berbagai money politik lainnya.

Untuk itu, katanya, sekaranglah saatnya minta kepada Bawaslu untuk menjelaskan masalah ini dan Komisi II akan menetapkan satu keputusan yang bersifat nasional untuk mempertanyakan legalitas dari hasil Pemilu 2009.

Karena berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran fundamental terhadap ketentuan yang sudah digariskan dalam UU. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu didisain sedemikian rupa untuk mencegah kecurangan-kecurangan. Namun ternyata, dalam prakteknya di lapangan bagai mimpi buruk bagi orang yang merindukan hasil-hasil yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hal yang sama disampaikan anggota F-PDIP H. Fachrudin yang mengatakan Pemilu Legislatif lalu penuh dengan kecurangan-kecurangan, dimana setiap TPS, Ketua KPPS memiliki berita acara lebih dari satu. "Dimana berita acara yang dipakai sisanya kan tidak pernah kita lihat.

Itu semua dipakai, tetapi penghitungan berita acara dikerjakan ditempat yang lain, disesuaikan dengan selera penguasa hasil pemilu saat itu," katanya.

Menurut Fachrudin, ini yang tidak pernah dibicarakan dan secara keseluruhan

dia melihat hasil pemilu tidak benar dan harus dibicarakan secara tuntas.

Bahkan Fachrudin menyebut Bawaslu banci, mengatakan Pemilu legislatif berjalan amburadul, tapi tidak mengambil sikap melihat kecurangan-kecurangan

yang banyak terjadi diberbagai daerah. Pimpinan rapat akhirnya menyetujui agenda rapat pagi itu ditambah dengan evaluasi hasil Pemilu Legislati 2009. (tt)

KOMISI II DUKUNG PEMEKARAN KABUPATEN BOGOR BARAT

Komisi II DPR RI mendukung usulan pemekaran Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat. Dukungan ini diberikan berdasarkan usulan masyarakat Bogor yang telah memperjuangkan pemekaran daerah tersebut mulai dari tahun 1998.

Demikian disampaikan salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Barnstein Samuel Tundan saat audiensi dengan DPRD dan Lurah-lurah Kabupaten Bogor, Selasa (9/6) yang diterima langsung Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP).

Disela-sela Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, Eka juga didampingi Jamaluddin Karim (F-BPD), Pastor Saut Hasibuan (F-PDS) dan H. Andi Wahab Datuk Majokayo (F-PG).

Eka mengatakan, Komisi II DPR pada prinsipnya mengapresiasi niat baik masyarakat Bogor untuk memekarkan daerahnya. Namun tentunya, persyaratan-persyaratan bagi suatu daerah yang akan dimekarkan harus dipenuhi terlebih dahulu.

Jika melihat potensi daerah, jumlah penduduk yang begitu besarnya, sumber daya manusia yang tidak kekurangan, Eka menyesalkan kenapa baru sekarang diajukan ke DPR untuk dimekarkan. Jika diajukan setahun yang lalu, kemungkinan besar pembentukan daerah otonom baru sudah dapat direalisasikan.. "Komisi II akan merespons dan memproses lebih lanjut," kata Eka.

Dalam hal ini Tundan sependapat kenapa tidak diusulkan tahun lalu. Hal ini dikatakan mengingat masa bakti anggota DPR periode 2004 – 2009 tinggal 4 bulan lagi. Dikhawatirkan jika baru diusulkan

sekarang, waktunya tidak terkejar lagi, mengingat prosesnya masih cukup panjang.

Pada kesempatan tersebut Lurah Desa Cigudep Kabupaten Bogor, Firdaus mengatakan, bahwa keinginan memekarkan Bogor menjadi Bogor Barat bukanlah semata-mata keinginan pribadi atau kelompok.

Menurutnya, keinginan ini sudah menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi harga mati bagi daerahnya untuk segera dimekarkan. Pemekaran ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali dan yang terpenting untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Bogor barat.

Untuk itu, dia bersama-sama aparat desa lainnya dan anggota DPRD yang mewakili masyarakat meminta kepada dewan agar RUU Pemekaran Bogor Barat ini dimasukkan dalam skala prioritas.

Sebetulnya, kata Firdaus, jika dilihat potensi daerah dan potensi lainnya, tanpa dimohon pun pemekaran Kabupaten Bogor Barat akan dikedepankan. Hal ini mengingat Kabupaten Bogor yang dekat dengan pusat pemerintahan, namun disatu sisi sungguh ironis beberapa puluh kilo meter dari ibu kota masih banyak masyarakat yang kondisinya sangat memprihatinkan. "Karena itu, pemekaran ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas," tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, pemekaran Bogor Barat ini telah didukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Pemda untuk membantu selama tiga tahun berturut-turut setelah daerah itu dimekarkan dari uang APBD 2009.

Selain itu, untuk Pilkada, Pemerintah Daerah akan membantu sebesar Rp 15 milyar dan setiap tahun Pemerintah Provinsi akan membantu satu milyar. (tt)

KOMISI II KEMBALI TANYAKAN KEVALIDAN DPT PILPRES

Komisi II DPR RI kembali tanyakan kevalidan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilakukan perbaikan dari DPT Pemilu Legislatif yang lalu.

Pertanyaan ini diajukan oleh mayoritas anggota Komisi II pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (8/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E.

Mangindaan (F-PD) yang didampingi Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP).

Seperti disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar Rustam Tamburaka, masih

banyak warga negara yang memiliki hak untuk memilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.

Rustam menambahkan, ada beberapa data dari daerah yang menurut KPU Sumatera Utara masih banyak kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia, terutama di Sumatera Utara yang DPTnya masih berantakan. Baik nama pemilih ganda, pemilih yang tidak terdaftar, orang yang sudah meninggal atau anggota TNI/POLRI yang terdaftar. Bahkan, kata Rustam, ada bayi umur lima tahun yang terdaftar pada Pemilihan Presiden (Pilpres). "Ini masih banyak ditemukan terutama di Sumatera Utara," kata Rustam.

Selain itu di daerah Banyumas, juga banyak data pemilih ganda ditemukan. Bahkan juga banyak data pemilih fiktif di sejumlah desa. Hal serupa juga disampaikan Ketua KPU Bekasi dan Kota Bandung.

Dalam hal ini Rustam menanyakan, apakah KPU sudah melakukan validasi data DPT untuk seluruh provinsi, kabupaten/kota termasuk kecamatan dengan menggunakan DPT alat validasi yang terpakai.

Senada dengan itu Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, dari DPT yang diperbaiki KPU, DPT Pilpres bertambah lima juta pemilih. Berarti, dari 171 juta pemilih legislasi menjadi 176 juta pilpres. Menurut Ferry, hal itu tidak menggambarkan sesuatu apapun dalam konteks perbaikan, karena yang memberikan hak suaranya pada pileg yang lalu hanya sekitar 107 juta. Dimana letak perbaikan penyusunan DPT ini," tanya Ferry.

Angka yang hanya bertambah lima juta menurut Ferry tidak akan memberi solusi dan problemnya tetap akan sama, berarti tidak ada perbaikan apapun terhadap DPS Pilpres.

Menanggapi persoalan DPT, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, dalam pemutakhiran data pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009, KPU mendapat dukungan data DPS dan DPT dari Departemen Dalam Negeri, dengan mengeluarkan surat edaran Nomor : 270/1574/Sj tanggal 8 Mei 2009 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Surat

edaran tersebut berisi perihal dukungan pemutakhiran data DPS dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Dalam surat tersebut diinstruksikan agar mendukung kelancaran penyempurnaan data DPS dan DPT dengan memberi penekanan kepada para Lurah, Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW untuk lebih mengintensifkan dukungan kepada petugas PPDP pada setiap TPS.

Hafiz menambahkan, sesuai tahapan dan jadwal Pemilu, pemutakhiran data pemilih sementara dilakukan mulai dari tanggal 10 April hingga 10 Mei 2009, dan diumumkan menjadi DPS tanggal 11 – 17 Mei 2009.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, total keseluruhan jumlah DPT sebesar 176.367.056, dengan jumlah pemilih Dalam Negeri 175.233.318 dan pemilih Luar Negeri 1.133.738.

Angka ini menunjukkan peningkatan pada pemilih dalam negeri Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 yang berjumlah 169.789.595, peningkatan tersebut sebesar 5.443.723 pemilih.

Sedangkan untuk pemilih luar negeri mengalami penurunan dari Pemilu Legislatif yang berjumlah 1.475.847 menjadi 1.133.738, yang mengalami penurunan sekitar 342.109 pemilih.

Hafiz menjelaskan, dalam pemutakhiran data pemilih Pemilu Pilpres, KPU menggunakan aplikasi DPTTOOLS guna mengidentifikasi adanya nama ganda atau penduduk yang berusia di

bawah 17 tahun dan belum menikah. Penerapan dari aplikasi tersebut dilakukan oleh KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tidak Ada Tabulasi

Sementara itu, anggota F-PPP Lena Maryana meminta penjelasan Ketua KPU perihal tidak lagi digunakannya IT pada proses penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Menurut Lena, hal itu menunjukkan suatu kemunduran yang luar biasa, karena ditengah-tengah era teknologi yang mengalami kemajuan yang sedemikian pesatnya masyarakat menginginkan informasi yang cepat dan mudah mengakses berbagai informasi hasil pemilu melalui Tabulasi Nasional Pemilu KPU atau dari Media Center KPU.

Lena menambahkan, alih-alih KPU mau memperbaiki IT sebelumnya, tapi KPU malahan memutuskan tidak menggunakan IT untuk penghitungan suara. "Kenapa IT ini tidak digunakan lagi apakah trauma dengan penghitungan pada Pileg suara yang lalu yang selesai hanya sekitar kurang lebih 80 persen, saya kira ini bukan jawaban kalau ini tidak digunakan," kata Lena.

Anggota KPU Abdul Aziz mengatakan, memang tidak ada tabulasi, untuk memproses angka tidak dilakukan pada hari H. Menurut Aziz, tabulasi akan dilakukan dari rekapitulasi kabupaten/kota dan hasilnya akan dikirimkan ke KPU Pusat. (tt)

DPR SIAP MENJADI TUAN RUMAH SIDANG UMUM FASPPED

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah Sidang Umum Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED) yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI H.R. Agung Laksono, yang juga sebagai Presiden FASPPED dalam pidato pembukaan sidang FASPPED, di DPR, Selasa (9/6).

"Kami siap untuk menjadi tuan rumah

sidang FASPPED yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 yang akan datang," kata Agung Laksono.

Dalam pidatonya, Presiden FASPPED menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan membentuk generasi muda harapan bangsa.

“Oleh karena itu, parlemen sudah selayaknya memberikan dukungan penuh untuk bidang pendidikan melalui perannya dalam membuat UU dan mengesahkan penggunaan anggaran serta mengawasi kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah,” ujar Agung.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Tosari Widjaja menjelaskan, forum yang terbentuk pada bulan Oktober 2008 pada saat diadakannya Parliamentary Conference for Education in Asia-Pacific Region di Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kepedulian anggota parlemen terhadap dunia pendidikan dan tantangan-tantangan yang dihadapi di wilayahnya masing-masing sekaligus juga untuk mendukung pencapaian program Education for All (EFA) yang dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 1990 yang

mengamanatkan pencapaian 6 (enam) tujuan EFA, diantaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menyeluruh, pemberantasan tuna aksara dan kesetaraan gender di institusi pendidikan pada 2015.

Tosari menambahkan, agenda sidang yang pertama dan dihadiri oleh 4 (empat) Negara yaitu, Indonesia, Samoa, Korea Selatan, Nepal, serta perwakilan UNESCO Paris ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi berbagai sub-region di Asia Pasifik dalam mencapai keenam target dari EFA. Selain itu sidang juga membahas hal-hal yang terkait dengan penguatan organisasi FASPPED yang baru dibentuk tersebut.

Lebih lanjut Tosari menjelaskan, sidang FASPPED yang pertama tersebut juga berhasil menyimpulkan beberapa rekomendasi, antara lain, mendorong pembentukan komisi yang membidangi pendidikan di parlemen Negara-negara anggota FASPPED karena belum seluruhnya memiliki komisi tersebut. Selain

itu, mengupayakan pembentukan UU khusus mengenai dukungan terhadap kinerja guru-guru di daerah terpencil terutama terkait dengan insentif yang diberikan, serta penguatan kerjasama antara parlemen, pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat madani di bidang pendidikan.

Tosari juga menjelaskan, peran serta aktif dalam FASPPED semakin memantapkan keseriusan dan komitmen DPR RI dalam bidang pendidikan. Setelah memperkuat inisiatif di dalam negeri, antara lain melalui pengesahan kenaikan anggaran untuk pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN dan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pengesahan UU tentang Guru dan Dosen, DPR kali ini menurut Tosari menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas dan akses terhadap pendidikan di kawasan Asia Pasifik. (olly)

Kegiatan dan Berita seputar DPR-RI
dapat Anda akses melalui website kami :



www.dpr.go.id